

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta
- Aprilia, Hera. (2009), *Evaluasi Pelaksanaan Transmigrasi Lokal Model Ring I Pola Tani Nelayan di Desa Bugel, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulon Progo dan Desa Gesing, Kecamatan Panggang, Kabupaten Gunung Kidul*. Yogyakarta: MPKD UGM.
- Awang, San Afri. (2001), *Gurat Hutan Rakyat di Kapur Selatan*. Yogyakarta: Pustaka Kehutanan Masyarakat. Debut Press.
- Awang, San Afri., Andayani, Wahyu., Himmah, Barriatul., Widayanti, Wahyu Tri., Affianto, Agus. (2002), *Hutan Rakyat – Sosial Ekonomi dan Pemasaran*. Yogyakarta: Badan Penerbitan Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada.
- BLU Pusat P2H. (2014), *Surat Penawaran Ketentuan Pinjaman Dana Bergulir Pembiayaan Pembangunan Hutan Rakyat*. Pusat P2H, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jakarta.
- Donnie, Syahrul., Mashudi., Irawan, Evi. (2002), *Kemitraan Dalam Pengembangan Hutan Rakyat Kasus di Kabupaten Klaten, Karanganyar, dan Blitar*. Yogyakarta: Jurnal Hutan Rakyat, Volume IV, No. 1, Th. 2002. Hal. 1-22. Pusat Kajian Hutan Rakyat, Universitas Gadjah Mada.

- Darussman D dan Hardjanto. 2006. Tinjauan Ekonomi Hutan Rakyat. Di dalam:
Prosiding Seminar Hasil Penelitian Hasil Hutan 2006. Bogor. Kementrian
Kehutanan : Pusat Penelitian dan Pengembangan Hasil Hutan. hlm 4 – 13.
- Echols, John M., Hassan, Shadily. (2000), *Kamus Inggris-Indonesia*.
Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Fauziyah, Eva.,Sanudin. (2012), *Peluang Pendanaan Bagi Pengusahaan Hutan
Rakyat*. Balai Penelitian Teknologi Agroforestry.
- Hardjanto (2003), *Keragaman dan Pengembangan Usaha Kayu Rakyat di
Pulau Jawa*. Disertasi (tidak dipublikasikan). Bogor: Sekolah
Pascasarjana IPB.
- Ihrom. 2004. Bunga Rampai Sosiologi Keluarga. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
- Mudjiono. (2006), *Belajar dan Pembelajaran*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Nugroho, Bramasto (2010), *Pembangunan Kelembagaan Pinjaman Dana
Bergulir Hutan Rakyat*. JMHT Vol. XVII, (2): 79–88.
- Nugroho, Bramasto (2011), *Analisis Perbandingan Beberapa Skema Pinjaman
untuk Pembangunan Hutan Tanaman Berbasis Masyarakat di Indonesia*.
JMHT Vol. XVII, (2): 79–88.
- Purwanto. (2007), *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (2010), *Kerangka Acuan Seminar Pola Pengelolaan dan Pembiayaan Hutan Rakyat*. Jakarta: Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Badan Layanan Umum (BLU) Kehutanan.

Puspitojati, Triyono., Mile, M. Yamin., Fauziah, Eva., Darusman, Dudung. (2014), *Hutan Rakyat: Sumbangsih Masyarakat Pedesaan Untuk Hutan Tanaman*. Yogyakarta: PT Kanisius.

Putranto, Y.J. (2009), *Menghijaukan Tanah Jawa: Strategi Pengembangan Ekonomi dan Penyelamatan Lingkungan Melalui Hutan Rakyat*. Jakarta: Wana Aksara.

Rahmadi, Agus Isnantio (2010), *Peluang Dukungan Permodalan Usaha HTI Melalui Pembiayaan Dana Bergulir BLU Pusat P2H dalam Rangka Peningkatan Realisasi Penanaman*. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Rohadi D, Roshetko JM, Perdana A, Blyth M, Nuryartono N, Kusumowardani N, Pramono AA, Widyani N, Fauzi A, Sasono MJ *et al.* Improving economic outcomes for smallholders growing teak in agroforestry systems in Indonesia (final report). Canberra: ACIAR.

Saqib SE, Kuwornu JKM, Panezia S, Ali U. 2017. Factors determining subsistence farmer's access to agricultural credit in flood-prone areas of Pakistan. *Kasetsart Journal of Social Sciences* xxx (2017): 1-7.
<https://doi.org/10.1016/j.kjss.2017.06.001>.

Supriadi, Dodi (2002), *Pengembangan Hutan Rakyat di Indonesia*. Jurnal Hutan Rakyat, Volume IV, No. 1, Th. 2002. Hal. 23-34. Yogyakarta: Pusat Kajian Hutan Rakyat, Universitas Gadjah Mada.

Yunanda, Martha. (2009), *Metode Inquiry dalam Pembelajaran*. Artikel Social-Science.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang No. 41 tahun 1999 tentang Kehutanan

Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 105/KMK.05/2010 tentang Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (Pusat P2H) di Kementerian Kehutanan.

Peraturan Kepala Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan Nomor: P.3/P2H-2/2013, tentang Pedoman Permohonan Pinjaman untuk Pembangunan Hutan Rakyat Tanpa Lembaga Perantara.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.69/Menhut-II/2008, tentang Standar Pelayanan Minimum untuk Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan.

Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.23/Menhut-II/2007, tentang Tata Cara Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Dalam Hutan Tanaman Rakyat Dalam Hutan Tanaman

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.88/Menhut-II/2014, tentang Hutan Kemasyarakatan

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.36/Menhut-II/2012, tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 112/PMK.05/2015, tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.59/Menlhk-Setjen/2015, tentang Tata Cara Penyaluran dan Pengembalian Dana Bergulir untuk Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menlhk-II/2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum.